

17

by Nairobi Nairobi

Submission date: 28-Dec-2021 10:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 1736005937

File name: 17._Kepemimpinan_Di_Daerah_Dan_Pengaruhnya.doc (229.5K)

Word count: 5697

Character count: 36317

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

**Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)**

Nairobi

Dosen FEB Unila

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari kepemimpinan di daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepemimpinan di daerah merupakan hasil dari sinergitas dari kepemimpinan eksekutif (Kepala daerah) dan legislatif (DPRD) di masing-masing daerah. Sampel yang digunakan adalah 150 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah melakukan pilkada di tahun 2005, 2006 dan 2007. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemimpinan yang bersinergis diantara kepala daerah dan DPRD akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. ----

Kata Kunci : Kepemimpinan, sinergitas, pertumbuhan ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the influence of leadership in the region and its impact on economic growth. Local leadership is the result of synergy of executive leadership and the parliament in each region. The samples used were 150 districts and municipalities in Indonesia, which has conducted the elections in 2005, 2006 and 2007. The results prove that the leadership in synergism between the head region and Parliament will have a positive impact on economic growth. --

Key word : leadership, synergy, economic growth.

Pendahuluan

Latar Belakang

Akhir-akhir ini beberapa ekonom tertarik untuk meneliti hubungan antara kepemimpinan dan pertumbuhan ekonomi, setelah melihat berbagai fenomena perubahan dramatis dalam pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan bergantinya kepemimpinan di berbagai negara. Penelitian awal dilakukan oleh Jones dan Olken (2005), yang meneliti hubungan kualitas kepemimpinan nasional (*national*

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

leadership) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sejak Perang Dunia Kedua.

Berdasarkan penelitian tersebut beberapa artikel mencoba untuk melihat hubungan tersebut. Parkins, Sherly dan Wint (2008) mengkaji peranan dari kepemimpinan politik dalam pembangunan ekonomi, di Jamaika. Kajian yang sama untuk negara Afrika dilakukan oleh Thomas (2008), Thomas menganalisa peranan dari kepemimpinan politik, proses pembuatan kebijakan dan proses mempelajari kebijakan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Rhawanda. Penelitian yang lebih fokus melihat pengaruh kepemimpinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Afrika dilakukan oleh Kagochi (2008), yang meneliti pengaruh gaya kepemimpinan (militer atau sipil) terhadap pertumbuhan di Nigeria. Untuk Wilayah Amerika Latin, dilakukan oleh Cardoso dan Graeff (2008), mereka membahas kepemimpinan politik dan reformasi ekonomi berdasarkan pengalaman negara Brazila.

Namun pada dekade sebelumnya hanya sedikit perhatian yang diberikan mengenai variabel ini, yaitu seberapa besar dan bagaimana pemimpin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi?. Menurut Parkins, Sherly dan Wint (2008) mekanisme utama bagaimana pemimpin politis berkontribusi terhadap pembangunan adalah melalui pilihan yang dilakukan dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tepat, sehingga membuat institusi pemerintahan menjadi efisien. Fakta ini didukung oleh hasil Penelitian dan kajian-kajian yang telah dilakukan terutama hasil dari Jones dan Olkes (2005) yang memberikan suatu bukti yang kuat, bahwa kepemimpinan merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Goemens dan Chiozza (2003), pemimpin sebagai individu akan melakukan pilihan kebijakan dan mengambil kebijakan yang maksimum dan melakukan antisipasi dampak dari pemilihan kebijakan selama menjabat. Dalam perspektif ini pemimpin berfungsi untuk: menengahi konflik, memberikan sangsi, mempromosikan pembangunan ekonomi, memulai reformasi politik, menentukan pemilih umum.

Beberapa penelitian dan paper yang telah dibahas lebih menekankan bagaimana pengaruh pimpinan politis terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara, namun berdasarkan pengamatan penulis belum ada penelitian yang melihat bagaimana pengaruh pimpinan pada tingkat lokal baik itu pimpinan

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

propinsi (Gubernur), pimpinan Kabupaten dan kota (Bupati/walikota) berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dipimpinnya.

² Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu atas permintaan DPRD. ² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk, baik di daerah propinsi maupun di daerah kabupaten dan kota. Pada umumnya, dewan perwakilan ini disebut sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah.

⁶ Sedangkan kewenangan menetapkan Peraturan Daerah, baik daerah propinsi maupun kabupaten, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. ² Oleh karena itu, fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan.

Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.22/1999 Gubernur dan Bupati/Walikota *diwajibkan* mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah

Masalah

Di Indonesia pilihan pimpinan politis di daerah dilakukan dengan cara pemilihan langsung (disebut Pilkada; Pemilihan Kepala Daerah) maupun ditunjuk oleh pemerintah pusat bagi daerah-daerah hasil pemekaran. Dalam pemilihan

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

langsung, proses pencalonan untuk menghasilkan pimpinan politis di daerah harus mengikuti berbagai persyaratan, *pertama* terkait dengan persyaratan parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon dan *kedua* persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon.

Dalam prakteknya ketentuan ini telah membuka kesempatan pada banyak calon dan parpol untuk berlomba untuk menjadi atau mengajukan calonnya. Namun, hal ini di sisi yang lain memiliki relasi politik dengan mekanisme *checks and balances* yang tidak stabil antara eksekutif dan legislatif. Di sejumlah tempat, terjadi pasangan calon yang memenangkan pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh gabungan partai-partai kecil baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak. Pasangan calon ini telah memenangkan pilkada dengan mengalahkan pasangan calon lain yang di dukung oleh parpol-parpol besar penghuni DPRD. Dalam praktek hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah akhirnya terjadi ketidakseimbangan hubungan atau distorsi politik antara kedua lembaga tersebut yang berujung pada konflik atau mandeknya kegiatan pemerintahan.

Problem lain yang muncul, parpol membuka kesempatan kepada calon non-kader untuk dapat menggunakan kendaraan politik berupa parpol dengan uang sewa kendaraan yang akan mahal. Tentu sebagai suatu *political cost* hal ini wajar, namun dengan besaran kompensasi politik yang nilainya mahal ini maka akan tercipta wujud politik oligarki partai atau bahkan politik uang. Dikhawatirkan dengan beban *political cost* yang tinggi ini, sang calon apabila kelak memenangkan pilkada akan berpikir sedemikian rupa untuk mengembalikan modal politik.

Kekhawatiran ini nantinya akan berujung pada *performance* yang buruk dari kepala daerah karena konsentrasi kerjanya diarahkan untuk mengembalikan modal politik ini dan bukan untuk membangun rakyatnya. Belum lagi kemungkinan korporasi korupsi yang mungkin terjadi baik yang diperuntukkan untuk mengembalikan modal politik pribadi si calon atau penyerahan kompensasi dukungan dari pihak ketiga yang membantu permodalan calon dalam memenangkan pilkada.

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

Kajian Pustaka

Model Pertumbuhan

Pengetahuan dari proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dimulai dari model ekonomi neoklasik yang muncul pada dekade tahun 1950an. Masalah utama dalam model neo kalsik adalah terfokus pada "proximate determinants" dari pertumbuhan seperti perbaikan dalam total faktor produksi dan akumulasi kapital dibandingkan dengan "deep determinant". Menurut Parkins, Sherly dan Wint (2008), "deep determinant" lebih fokus kepada pertumbuhan kontemporer dan teori pembangunan dari: Kelembagaan, geografi dan keterbukaan dalam perdagangan. Kelembagaan merupakan hal yang penting; institusi dasar merupakan syarat mutlak yang diperlukan dalam pembangunan, misalkan perlindungan terhadap hak cipta, aturan hukum, efesiensi birokrasi, tidak terjadinya korupsi pada pemerintah.

Win (2003) dalam studinya menyatakan bahwa stabilitas ekonomi makro dan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas dalam makro ekonomi merupakan jangkar bagi stabilitas dalam regim nilai tukar dalam pasar valuta asing. Disisi lain stabilitas makro ekonomi akan menjadikan turunnya resiko dalam berusaha sehingga akan menarik bagi investor.

Brempong dan Camacho (1998) menginvestigasi pengaruh dari ketidakstabilan politik terhadap formasi human kapital dan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukan bahwa human kapital sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sedangkan ketidakstabilan politik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung ketidakstabilan politik terhadap pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut terjadi karena adanya penurunan investasi baik dalam bentuk fisik maupun human kapital. Namun di sisi lain pertumbuhan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap kestabilan politik.

Beberapa studi tersebut mencoba memasukan beberapa variabel lain selain variabel utama dalam teori pertumbuhan neoklasik, variabel kepemimpinan merupakan variabel lain yang dicoba untuk dimasukan dalam teori pertumbuhan ekonomi. Jones dan Olken (2005) menemukan bukti yang kuat mengenai masalah kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

Mereka menurunkan dua alat uji, yaitu Standar Wald test dan non parametrik Rank test untuk melihat bagaimana pengaruh kualitas pemimpin dan keamtian pemimpin terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaan digunakan adalah :

$$g_{it} = v_t + \theta l_{it} + \varepsilon_{it}$$

g_{it} mewakili pertumbuhan di negara i pada waktu t , v_t adalah fixed-effect dari dari negara i , dan ε_{it} distribusi normal *error term* dengan rata-rata 0 dan varian $\sigma^2 \varepsilon_{it}$, L_{it} mewakili kualitas pimpinan, yang ditetapkan melalui kehidupan pemimpin. Pemimpin diseleksi menurut:

$$l_{it} = \left\{ \begin{array}{l} l_{i,t-1} P(\delta_0 g_{it} + \delta_1 g_{it-1} + \dots) \\ 1 - P(\delta_0 g_{it} + \delta_1 g_{it-1} + \dots) \end{array} \right\}$$

l berdistribusi normal dengan mean μ , varians $\sigma^2 l$, dan $\text{Corr}(l, l') = \rho$.

Sedangkan untuk melihat pengaruh kematian pemimpin terhadap pertumbuhan ekonomi mereka membandingkan perbedaan pertumbuhan rata-rata ekonomi selama pemimpin masih hidup dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi setelah pemimpin meninggal dunia. Dengan menggunakan persamaan:

$$g_{it} = \alpha z + \beta_1 \text{PRE}_z + \beta_2 \text{POST}_z + v_i + v_t + \varepsilon_{it}$$

dimana g_{it} adalah tingkat pertumbuhan tahunan riil paritas daya beli-PDB per kapita diambil dari *Penn World Tables*, dan i negara-negara indeks, t indeks waktu tahun, dan z Indeks kematian pemimpin. efek tetap negara dan waktu dimasukkan masing-masing melalui v_i dan v_t . Untuk setiap kematian pemimpin, diindeks oleh z , dipisahkan oleh dummy $\text{PRA } z$ dan $\text{POST } z$. $\text{PRA } z$ adalah dummy sebesar 1, dalam tahun T sebelum pemimpin negara z meninggal. $\text{POST } z$ dummy adalah sebesar 1 dalam tahun T setelah pemimpin negara z 's meninggal.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Kagochi (2008) yang ingin melihat bagaimana pengaruh dari gaya kepemimpinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Model yang dibangun oleh Kagochi didasarkan atas model pertumbuhan Solow yang dimodifikasi, adapun model empiris yang digunakan adalah:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 k_t + \beta_2 l_t + \beta_3 x_t + \beta_4 m_t + e_t$$

dimana:

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

y = pertumbuhan GDP

k = investasi

l = pertumbuhan tenaga kerja

x = pertumbuhan ekspor

m = dummy untuk kepemimpinan

e = stokastik *error term*

Variabel dummy untuk gaya kepemimpinan militer bernilai 1 dan gaya kepemimpinan sipil bernilai 0. Dengan menggunakan data time series dari tahun 1960-2001 dan menggunakan teknik regresi linier berganda didapatkan ternyata tidak ada pengaruh dari gaya kepemimpinan (baik militer maupun sipil) terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Model ini sejalan dengan Model pertumbuhan ekonomi Levin dan Renalt (1992), mereka melakukan survei literatur dari berbagai studi empiris hubungan jangka panjang pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi, politik dan kelembagaan. Menggunakan Model *Extrem-Bound Analysis* (EBA) untuk menguji kuat dan lemahnya pengaruh koefisien estimasi dari berbagai variabel terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Model persamaan yang digunakan adalah,

$$Y = \beta_i I + \beta_m M + \beta_z Z + u$$

Y adalah pertumbuhan PDB riil perkapita, I adalah variabel yang harus ada dalam fungsi pertumbuhan, M adalah variabel sesuai dengan kepentingan analisa dan Z adalah variabel lain yang dipilih yang dapat menggambarkan fungsi pertumbuhan.

Sinergitas Eksekutif dan Legislatif.

Sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat dilihat dari dari fragmentasi pemerintahan. Apakah eksekutif mendapatkan dukungan dari legislatif. Jika kepala pemerintahan dicalonkan oleh sebuah partai atau koalisi partai politik yang memiliki suara mayoritas di lembaga legislatif dan memenangkan pemilihan, maka pemerintahan yang terjadi disebut dengan istilah *unified government*. atau dalam penelitian ini disebut sebagai terjadinya sinergitas. Kekuasaan politik di legislatif dan eksekutif dikuasai oleh satu atau koalisi partai yang sama. Namun sebaliknya jika kepala pemerintahan didukung

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

oleh satu atau suatu koalisi partai namun tidak mendominasi suara di lembaga legislatif maka bentuk pemerintahan menjadi terbelah atau disebut sebagai *divided government*. Terjadi pembagian kekuasaan, eksekutif dikuasi oleh satu atau suatu koalisi partai dan legislatif dikuasi oleh satu atau suatu koalisi partai yang lain.

idealnya dalam pemerintahan terjadi sinergitas, yaitu partai penguasa pemerintahan memiliki kendali atas cabang eksekutif dan legislatif, sedangkan partai oposisi memainkan peran pengawasan. Akan tetapi, ketika tidak terjadi sinergitas, terjadi pemisahan dalam penguasaan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Salah satu pihak saling menguasai kendali atas kedua lembaga itu. Dampaknya wewenang partai yang berkuasa dapat menurun, dan cenderung terjadi konflik dalam pemerintahan (Cutler, 1980, 1988; Leonard, 1991; Sundquist, 1990).

Beberapa penelitian tentang sinergitas lebih fokus kepada masalah apakah sinergitas pemerintahan akan berdampak lebih baik dibandingkan jika tidak terjadinya sinergitas dalam pemerintahan. Sejumlah studi menyatakan bahwa tidak terjadinya sinergitas atau terjadinya *divided government* cenderung menyebabkan terjadinya inefisiensi dan jalan buntu untuk penguasaan lembaga eksekutif dan legislatif (Binder, 1999; Coleman, 1999; Cutler, 1980; Leonard, 1991; McCubbins, 1991).

Hal yang sama di hasilkan oleh Wu dan Huang (2008) yang meneliti pengaruh *divided government* pada tingkat kota/distrik terhadap persepsi publik akan kinerja walikota, hasilnya mengindikasikan bahwa publik memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dengan *unified government* jika dibandingkan dengan *divided government*.

Walaupun beberapa peneliti percaya bahwa *divided government* dapat menyebabkan lebih banyak kebuntuan dalam pembuatan kebijakan dan inefisiensi pemerintahan. Namun Mayhew (1991) menyatakan tidak ada perbedaan besar antara *divided government* dan *unified government*. *Divided government* tidak menyebabkan terjadinya kebuntuan legislatif dan eksekutif, penentuan kebijakan diantara kedua lembaga ini masih tetap sejalan. Dengan kata lain Mayhew melihat bahwa sinergitas tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi jika salah satu pihak menjadi penyeimbang (*check and balance*) di dalam menjalankan pemerintahan.

Nairobi

Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)

Berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia - LSI (2007), hasil Pilkada pertama hingga Desember 2006, dari 290 wilayah Pilkada yang telah melangsungkan Pilkada, ternyata sebagian besar (56.9%) pemerintahan di daerah berada pada posisi yang tidak sinergis atau *divided government*. Sebanyak 43.1% lainnya ditandai dengan adanya kepala daerah yang diusung oleh partai dengan kursi mayoritas di DPRD. Fakta lainnya adalah 86.21% dari wilayah yang telah melangsungkan Pilkada, partai pengusung kepala daerah tidak mempunyai kursi mayoritas di DPRD. Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa partai penyokong kepala daerah mempunyai kekuatan lemah, dengan jumlah kursi di DPRD antara 15 hingga 30 persen saja, sehingga potensi konflik antara kepala daerah terpilih dan DPRD cenderung akan tinggi.

Metodologi Penelitian

Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data hasil publikasi-publikasi dari: Badan Pusat Statistik (BPS); Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU); Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Periode data yang digunakan adalah periode tahun 2005 - 2012, aras data meliputi aras data kabupaten dan kota. Data yang digunakan adalah data riil, data riil didapatkan dengan cara mendeflasikan data nominal dengan Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) tahun dasar 2000 dari masing-masing kabupaten dan kota sampel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota (505 daerah) yang berada dalam wilayah Indonesia. Penentuan sampel daerah menggunakan metode sampel bertujuan (*purposive sample*), yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan kriteria sampel.

Kriteria sampel kabupaten dan kota dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pilkada secara langsung pada tahun 2005, 2006 dan 2007.
2. Kabupaten/kota tersebut merupakan daerah yang dimekarkan dari kabupaten atau kota induknya minimal pada tahun 2001

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

3. Kabupaten dan kota tersebut setelah tahun 2001- 2011 tidak lagi dimekarkan menjadi kabupaten dan kota yang baru.

Berdasarkan kriteria tersebut didapatkan sebanyak 150 kabupaten dan kota yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel.

Jumlah kabupaten dan kota sampel berdasarkan asal daerah propinsinya, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel.1 Jumlah sampel berdasarkan Propinsi, Kabupaten/Kota Sampel Penelitian

No	Propinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota
1	Sumatera Utara	4	6
2	Sumatera Barat	7	2
3	Riau	7	2
4	Jambi	7	0
5	Lampung	4	2
6	Jawa Barat	6	2
7	Jawa Tengah	23	5
8	DI Yogyakarta	4	1
9	Jawa Timur	17	3
10	Bali	6	1
11	Nusa Tenggara Barat	2	1
12	Nusa Tenggara Timur	3	1
13	Kalimantan Barat	3	0
14	Kalimantan Selatan	4	2
15	Kalimantan Timur	7	3
16	Sulawesi Utara	0	2
17	Sulawesi Tengah	5	1
18	Sulawesi Selatan	7	0
19	Sulawesi Tenggara	0	1
	Jumlah	115	35

Sumber: Data diolah

Unit Analisis

Unit analisis pada level kabupaten dan kota di Indonesia, dengan alasan:

1. Jumlah kabupaten dan kota di Indonesia mencukupi untuk digunakan sebagai sampel data *cross section*, untuk mengetahui pengaruh dari Pemilu legislatif tahun 2004 dan Pilkada secara langsung yang dimulai tahun 2005 - 2007.
3. Data yang digunakan merupakan data *cross section* dan bukan data panel dikarenakan adanya keterbatasan data untuk periode Pemilu Legislatif tahun 2009 dan Pilkada langsung tahun 2010. Anggota DPRD dan kepala daerah

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

terpilih, memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun, sehingga terdapat keterbatasan data untuk mengetahui kinerja mereka sampai dengan lima tahun kedepan.

Model

Menggunakan model pertumbuhan ekonomi Levin dan Renalt (1992).

Model persamaan yang digunakan adalah,

$$Y = \beta_1 I + \beta_2 M + \beta_3 Z + u$$

Y adalah pertumbuhan PDB riil perkapita, I adalah variabel yang harus ada dalam fungsi pertumbuhan, M adalah variabel sesuai dengan kepentingan analisa dan Z adalah variabel lain yang dipilih yang dapat menggambarkan fungsi pertumbuhan.

Variabel-variabel I dipilih atas dasar teori ekonomi dan empiris, yaitu: 1) rasio investasi terhadap PDB; 2) inisial level PDB riil perkapita; 4) rata-rata pertumbuhan populasi. Variabel-variabel ini menjadi variabel kontrol penelitian. Variabel-variabel M adalah variabel-variabel institusi, politik maupun kebijakan pemerintah yang menjadi fokus studi. Variabel yang mewakili adalah sinergitas pemerintah dengan DPRD. Variabel Z adalah variabel beberapa variabel lain yang dipilih dan dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

$$\text{Growth PDRB}_{\text{kap}} = f(\text{Dummy_Sinergitas}, \text{inisial_PDRB}, \text{investasi}, \text{growth_pdkk})$$

Bentuk Persamaan struktural dari persamaan fungsional tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

$$\text{growth_PDRB}_{\text{kap}_i} = \beta_0 + \beta_1 \text{Dummy_Sinergitas}_i + \beta_2 \text{inisial_PDRB}_i + \beta_3 \text{investasi}_i + \beta_4 \text{growth_pdkk}_i + u_i$$

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 2 Ringkasan Variabel, Pengukuran dan Sumber Data

No (1)	Variabel dan Notasi (2)	Pengukuran dan satuan (3)	Sumber Data (4)
1	Pertumbuhan PDRB Riil Perkapita (<i>growth_PDRB</i>)	Nilai rata-rata 5 tahunan, mengikuti periode jabatan kepala daerah terpilih. Dalam persen.	BPS
2	Sinergitas pemerintahan dengan DPRD (<i>Dummy_sinergitas</i>)	<i>dummy_sinergitas</i> bernilai 1 (satu) jika lebih dari 51 persen DPRD mencalonkan kepala daerah	KPU RI dan Kemendagri, dirjen Otda
3	Inisial Level PDRB riil Perkapita (<i>Inisial_PDRB</i>)	<i>Log</i> dari tingkat PDRB riil perkapita awal kepala daerah mendapatkan jabatannya.	BPS
4	Rasio Investasi terhadap PDRB riil (<i>investasi</i>)	Rata-rata rasio antara investasi riil dan PDRB riil, mengikuti periode jabatan kepala, satuan persen.	BPS
5	Pertumbuhan penduduk (<i>growth_pdkk</i>)	Rata-rata pertumbuhan penduduk mengikuti periode jabatan kepala, satuan persen.	BPS

Alat Analisis

Metode analisis yang di gunakan dalam adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)* yang digunakan untuk melihat respon atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda, dengan alat bantu operasional program E-views 6,0

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Data variabel Ekonomi

Data Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata pertumbuhan PDRB riil perkapita di masing-masing kabupaten dan kota sampel selama periode kepala daerah berkuasa. Pertumbuhan PDRB perkapita

Nairobi

Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)

riil mencerminkan prestasi masing-masing kepala daerah di sektor ekonomi selama mereka menduduki jabatan politisnya. Tabel 4.1 memperlihatkan pertumbuhan PDRB perkapita riil berdasarkan kelompok pertumbuhan.

Tabel 3 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sampel (dalam Persen)

Pertumbuhan PDRB Riil Perkapita	Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
2,00 – 4,00	9	3,44	0,38
4,00 – 6,00	108	5,21	0,49
6,00 – 8,00	30	6,66	0,47
8,00 – 10,00	2	9,00	0,61
10,00 – 12,00			
Seluruh data	1	11,67	-
	157	5,38	1,10

Sumber : BPS (data diolah, periode data 2005 – 2012, rata-rata disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah)

Tabel 4.1 memperlihatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,38 persen dengan koefisien variasi sebesar 20,27 persen. Data ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah cenderung memiliki variasi yang relatif kecil dari rata-ratanya.

Dilihat dari pengelompokan pertumbuhan ekonomi, hanya sebagian kecil atau 10 daerah sampel yang memiliki pertumbuhan terendah pada kelompok 2,00 – 4,00 persen dan dengan rata-rata 3,44 persen dan koefisien variasi sebesar 11,32 persen. Sebagian besar (108 daerah sampel) berada pada kelompok pertumbuhan 4,00 – 6,00 persen dengan rata-rata sebesar 5,21 persen dan koefisien variasi 10,24 persen. Kemudian terdapat 30 sampel daerah yang berada pada kelompok pertumbuhan 6,00 – 8,00 persen, dengan koefisien variasi sebesar 7,12 persen. Selain itu terdapat 2 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di kelompok 8,00 – 10,00 persen, dan hanya 1 daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi melebihi 10 persen.

Pertumbuhan Penduduk

Variabel pertumbuhan penduduk adalah rata-rata pertumbuhan penduduk sesuai dengan periode kepala daerah terpilih. Tabel 4.2 memperlihatkan pertumbuhan penduduk dari daerah sampel pada periode kepala daerah berkuasa. Rata-rata pertumbuhan penduduk di seluruh daerah sampel sebesar 1,76 persen, dengan koefisien variasi 89,38 persen. Ini menunjukkan bahwa

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

7 rata-rata pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah cenderung berbeda jauh dibandingkan dengan nilai rata-ratanya.

Dilihat dari pengelompokan pertumbuhan penduduk, terdapat 7 daerah yang berada pada kelompok pertumbuhan penduduk negatif atau kelompok -2,00 – 0,00 persen dengan rata-rata -0,20 persen. Sebagian besar (92 daerah) memiliki pertumbuhan penduduk pada kelompok 0,00 – 2,00 persen dengan rata-rata sebesar 0,88 persen dan koefisien variasi 60,28 persen. Selain itu terdapat 33 daerah yang masuk dalam kelompok pertumbuhan penduduk 0,02 – 0,04 persen, dengan nilai rata-rata sebesar 2,68 persen dan koefisien variasi yang relatif kecil 21,53 persen. Terdapat 16 daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk dalam kelompok 4,00 – 6,00 persen dengan rata-rata sebesar 4,82 persen dan hanya terdapat 2 daerah saja yang memiliki pertumbuhan penduduk pada kelompok 6,00 – 8,00 persen.

Tabel 4 Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Daerah Sampel (dalam persen)

Pertumbuhan Penduduk	Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
-2,00 – 0,00	7	-0,20	0,10
0,00 – 2,00	92	0,88	0,56
2,00 – 4,00	33	2,68	0,62
4,00 – 6,00	16	4,82	0,63
6,00 – 8,00	2	7,20	0,70
Seluruh data	150	1,76	1,56

Sumber : BPS (data diolah, periode data 2005 – 2012, rata-rata disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah)

Rasio Investasi Riil Terhadap PDRB Riil

Variabel rasio investasi riil terhadap PDRB riil yang digunakan dalam model pertumbuhan, merupakan rata-rata rasio investasi riil terhadap PDRB Riil yang terjadi di wilayah kabupaten maupun kota sampel sesuai dengan periode kepemimpinan kepala daerah terpilih di masing-masing daerah sampel. Perkembangan data rata-rata rasio investasi terhadap PDRB riil dapat dilihat pada Tabel 4.3 Rata-rata rasio investasi terhadap PDRB riil adalah sebesar 6 persen, dengan koefisien variasi 60,00 persen, ada keragaman yang cukup besar dari variasi sebaran data di daerah sampel. Jika dilihat berdasarkan kelompok data, sebagian besar sampel (122 daerah) berada pada kelompok 0,0 – 0,10 dengan rata-rata sebesar 6 persen dan koefisien variasi sebesar 20,40.

Nairobi

Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)

Terdapat 22 sampel yang termasuk pada kelompok rasio 0,10 – 0,20 dengan rata-rata rasio sebesar 11 persen dan koefisien variasi 8,78 persen. Terdapat 5 daerah yang termasuk dalam rasio kelompok 0,20 – 0,30 dengan rata-rata rasio sebesar 21 persen. Hanya ada satu daerah yang berada pada kelompok tertinggi yaitu rasio kelompok 0,30 – 0,40.

Tabel 5 Rasio Investasi Riil Daerah Terhadap PDRB Riil Daerah Sampel

Rasio investasi terhadap PDRB	Jumlah	Rata-Rata	Standar Deviasi
0,0 - 0,10	122	0,06	0,02
0,10 - 0,20	22	0,13	0,03
0,20 - 0,30	5	0,21	0,02
0,30 – 0,40	1	0,40	-
Seluruh data	150	0,06	0,07

Sumber : BPS (data diolah, periode data 2005 – 2012, rata-rata disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah)

Sinergitas Pemerintahan Daerah

Tabel 4.4 memperlihatkan jenis pemerintahan berdasarkan hubungan pihak legislatif terhadap pihak eksekutif. Berapa banyak anggota DPRD mendukung kepala daerah terpilih dalam pemerintahan. Jika jumlah anggota partai di DPRD yang mencalonkan dan mendukung kepala daerah terpilih lebih dari 51% dari jumlah seluruh anggota DPRD, maka jenis pemerintahan sinergis. dan sebaliknya

Tabel 6 Bentuk Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Sampel Penelitian

WILAYAH PULAU	<i>Sinergis Kab</i>		<i>Non sinergis Kab</i>		<i>Sinergis Kota</i>		<i>Non sinergis kota</i>	
	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
P. Sumatera	7	4.7	25	16.7	0	0.0	13	8.7
P. Jawa dan Bali	8	5.3	44	29.3	0	0.0	12	8.0
P. Nusa Tenggara	0	0.0	4	2.7	0	0.0	2	1.3
P. Kalimantan	2	1.3	13	8.7	1	0.7	4	2.7
P. Sulawesi dan Maluku	8	5.3	4	2.7	2	1.3	1	0.7
TOTAL	25	16.7	90	60.0	3	2.0	32	21.3

Sumber: KPU Dan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri (data diolah dari Hasil Pemilu Legislatif tahun 2004 dan Pilkada dimasing-masing daerah)

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

Dari Tabel 4.4, dari 117 kabupaten sampel terdapat 25 daerah atau 17 persen pemerintahan sinergis, dan 90 daerah atau 60 persen tidak sinergis. Sedangkan untuk daerah kota, dari 35 sampel daerah, hanya 3 kota atau 2 persen sinergis dan 32 kota atau 21 persen tidak sinergis. Jika dilihat secara keseluruhan terdapat 35 daerah atau 23 persen daerah sampel yang memiliki pemerintahan sinergis dan terdapat 125 daerah atau 77 persen daerah tidak sinergis.

Wilayah kabupaten di wilayah Pulau Jawa paling banyak tidak sinergis, diikuti berurut-turut oleh kabupaten di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kabupaten di wilayah Pulau Sulawesi dan Maluku memiliki bentuk pemerintahan sinergis terbanyak. Untuk daerah kota, tiga wilayah pulau yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Nusa Tenggara ternyata seluruh kota tidak sinergis. Kota yang memiliki pemerintahan yang sinergis hanya berada di wilayah Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Maluku.

Hasil perhitungan dan pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi (lihat lampiran 2) didapatkan hasil persamaan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Growth_PDRB} = & 0,0146 + 0,0062\text{Dummy_sinergi} + 0,0041\text{Inisial_PDRB} + \\ & (1,3552) \quad (3,1778)^{***} \quad (3,2004)^{***} \\ & 0,0379\text{Investasi} + 0,0004 \text{Growth_pddk} \\ & (2,6712)^{***} \quad (0,8063) \end{aligned}$$

() t-statistik

*** = signifikan pada $\alpha = 5$ persen

N = 150

R-squared	0.108007
Adjusted R-squared	0.083401
F-statistic	4.389348

Uji Asumsi Klasik OLS

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel bebas, variabel bebas yang digunakan untuk ketiga bentuk persamaan pada Tabel 4.5 yaitu variabel Dummy_sinergi, inisial_PDRB, Investasi dan

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

Growth_pddk. Hasil perhitungan korelasi antar variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Perhitungan Korelasi Antara Variabel Bebas

VARIABEL	KP	INISIAL_PDRB	INVESTASI	GROWTH_PDDK
DUMMY_SINERGI	1	-0.04	0.002	-0.12
INISIAL_PDRB		1	-0.09	-0.05
INVESTASIB			1	0.05
GROWTH_PDDK				1

Sumber: Hasil perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antar variabel bebas, didapatkan nilai koefisien korelasi antar variabel bebas sangat rendah, sehingga dapat di simpulkan bahwa model yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

b. Uji Heteroskadisitas

Untuk menghilangkan masalah heteroskadisitas dilakukan estimasi dengan menggunakan koreksi dengan varian heteroskadesitas terkoreksi atau (*heteroscedasticity-corrected variance*). dengan metode White. Hasil estimasi secara otomatis menghasilkan varians yang konstan (Winarno, 5.25). Dampaknya hasil estimasi telah terbebas dari masalah heteroskadisitas.

c. Uji Individual Variabel dan Inteprestai Hasil Perhitungan

Nilai R^2 dari sebesar 0,11; ini menunjukkan bahwa variasi variabel bebas yang digunakan (variabel Dummy_sinergi, inisial_PDRB, Investasi dan Growth-pddk) dapat menjelaskan variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Growth_PDRB) sebesar 11 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variasi variabel-variabel lain di luar model yang dibentuk.

Nilai $F_{stat} = 4,389$ nilainya lebih besar dari pada nilai nilai $F_{tabel4, 150} = 3,95$ pada tingkat kepercayaan 1 %, Hasil ini menunjukkan bahwa secara serempak seluruh variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat .

Nilai t hitung variabel Konstan C dari seluruh model nilainya lebih kecil dari nilai $t_{tabel} = 2,776$ sehingga secara statistik variabel ini tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Nilai t hitung untuk variabel Dummy_sinergi, inisial_PDRB, Investasi lebih besar dari dari nilai $t_{tabel} = 2,776$. Sehingga variabel tersebut secara statistik signifikan pada tingkatkepercayaan 5 persen.

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

nilai t-hitung variabel $growth_pddk$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 2,776$, variabel ini secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil perhitungan pada didapatkan nilai koefisien variabel $Dummy_sinergi$ 0,0062. Angka ini menunjukkan bahwa sinergitas pemerintahan antara legislatif dan eksekutif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintahan yang sinergis memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar 0,0062 persen dibandingkan dengan pemerintahan di daerah yang tidak sinergis.

Hasil perhitungan nilai koefisien variabel $inisial_PDRB$ sebesar 0,0041. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang divergen.

Nilai koefisien variabel $Investasi$ sebesar 0.0379. Angka ini menunjukkan bahwa rasio investasi terhadap PDRB berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. jika rasio investasi terhadap PDRB meningkat sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,0379 persen. Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis dan Pembahasan Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam model secara teoritis mampu mendukung pembentukan model, walaupun variabel $growth_pddk$ tidak signifikan. Hasil pembentukan model ini sejalan dengan hasil survei Levin dan Renalt (1992) yang menunjukkan variabel pertumbuhan penduduk cenderung *fragile* dalam pembentukan fungsi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara.

Ditemukan bukti variabel $dummy_sinergi$ berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan pemerintahan yang sinergis diantara kepala daerah dengan DPRD berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinergitas antara kepala daerah dan DPRD membuat kebijakan fiskal akan lebih efisien dan terpercaya. DPRD memiliki kekuasaan untuk membatasi kebijakan eksekutif melalui aturan yang ditetapkan atau adanya *check and balance* diantara kedua lembaga itu.

Di Indonesia, untuk mengatasi masalah *ketidaksinergisan*, kepala daerah akan melakukan antisipasi dengan melakukan politik akomodasi. Ada tiga jenis politik akomodasi yang digunakan oleh kepala daerah, pertama menempatkan orang-orang partai lain atau orang-orang yang didukung partai lainnya kedalam

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

ajaran birokrasi, ini untuk menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat juga merupakan tanggungjawab bersama. Politik akomodasi kedua dengan memberikan insentif kepada anggota DPRD berupa kenaikan gaji, pemberian tambahan tunjangan, tambahan fasilitas lainnya bagi anggota DPRD yang diambilkan dari dana APBD. Ketiga dengan melakukan sogokan kepada anggota DPRD atau melakukan korupsi secara berjamaah, sehingga yang *divided government* bukan menjadi *chek and balance* namun menjadi momok yang menakutkan bagi kepala daerah dan harus diatasi dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Jadi ketika telah terjadi sinergitas diantara ke dua lembaga ini terjadi kesepakatan serta pengurangan biaya politik untuk melakukan politik akomodasi. DPRD mendukung dan sejalan dengan kepala daerah, karena mereka berada pada satu kepentingan yang sama untuk menunjukkan prestasi kepada pemilih yang telah memilih partai dan kepala daerah tersebut.

Sundquist (1988), mengatakan bahwa rezim demokratik dimana partai pemerintah - partai politik mendukung pemerintahan, akan menciptakan menjadi instrumen pemerintahan yang esensial yang membawa kesatuan dan persatuan, dan karenanya akan membawa efektivitas pula dalam pemerintahan secara keseluruhan dengan menghubungkan badan eksekutif dan legislatif dalam suatu ikatan tujuan dan minat yang sama.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Wu dan Huang (2003), Streb dan Torrens (2009), yang menyatakan pemerintahan yang sinergis akan lebih efisien dibandingkan yang tidak sinergis.

Variabel kontrol, yaitu *inisial level PDRB perkapita (Inisial PDRB Perkapita)* memiliki tanda yang positif, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan antara wilayah di Indonesia mengarah ke pertumbuhan divergensi, daerah yang kaya akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang miskin sehingga kesenjangan pendapatan akan semakin meningkat. Kepala daerah terpilih belum bisa mengurangi kesenjangan pendapatan (PDRB riil perkapita) selama mereka berkuasa. Berdasarkan hasil beberapa penelitian tentang konvergensi pertumbuhan dan kesenjangan pendapatan dalam ranah daerah. Divergensi pertumbuhan PDRB riil perkapita dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Heriqbaldi (2009), dan Masfufah (2013).

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

Variabel investasi sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Semakin tinggi rasio investasi akan semakin tinggi pertumbuhan PDRB riil perkapita. Tajerin (2007), Levine dan Renalt (1992), menemukan hasil yang sama. Tingkat pertumbuhan modal fisik (investasi) berpengaruh positif terhadap kecepatan pertumbuhan PDRB riil di sesuai dengan teori akumulasi modal.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan

1. Model pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh variabel non ekonomi (sinergitas antar DPRD dengan Kepala daerah) dikarenakan variabel kontrol yang digunakan memiliki pengaruh sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi.
2. Sinergitas antar DPRD dengan Kepala daerah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Partai politik pendukung kepala daerah yang memiliki suara mayoritas akan berperilaku sebagai bagian dari pemerintah, sehingga penentuan kebijakan akan lebih efektif. Selain itu pemerintah yang sinergis akan mengurangi timbulnya biaya akomodasi yang harus dikeluarkan oleh kepala daerah (menguras APBD). Stabilitas pemerintahan menjadi kata kunci untuk pembuatan kebijakan yang pro pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Sinergitas antara kepala daerah dan DPRD bisa juga terjadi dalam kondisi kepala daerah tidak didukung oleh jumlah suara mayoritas partai politik di DPRD asalkan kepala daerah memiliki kemampuan manegerial dan akuntabilitas yang tinggi sehingga mampu menjadi koordinator menggerakkan sumberdaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
2. Pemilih dapat melakukan pilihan yang rasional dengan melihat jumlah suara partai politik pendukung kepala daerah untuk mendapatkan pemerintahan yang sinergis atau tidak
3. Penelitian ini masih terbatas melihat sinergitas pemerintahan dari jumlah suara partai politik di DPRD mendukung kepala daerah, penelitian lebih lanjut

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

dengan melihat lebih detail konflik-konflik antara DPRD dengan Kepala daerah akan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Binder, Sarah A. 1999. "The Dynamics of Legislative Gridlock, 1947-96". *American Political Science Review* 93: 519-33.
- Brempong, Kwabena and Samaria Munoz de Camacho, 1998, "Political Instability, Human Capital and Economic Growth in Latin America," *The Journal of Developing Area* 32,4 (summer)
- Cardoso, Fernando Henrique dan Graeff. Eduardo (2008), "Political Leadership and Economic Reform: The Brazilian Experience in the Context of Latin America" *Working Paper no. 38 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank On behalf of the Commission on Growth and Development*, Washington DC.
- Chiozza, Giacomo and Goemans, Hank E, (2008), "Avoiding Divergent Targets". *Journal of Peace Research* 41(4): 423-443.
- Coleman, John J. 1999. "Unified Government, Divided Government, and Party Responsiveness", *American Political Science Review* 93 (4): 821-835.
- Cutler, Lloyd N. 1980. "To From a Government: On the Defects of Separation of Powers", *Foreign Affairs* 59: 126-43.
- Cutler, Lloyd N. 1988. "Some Reflection about Divided Government", *Presidential Studies Quarterly* 485-492.
- Heriqbaldi, Bukit. 2009. "Konvergensi Tingkat Pedapatan, Studi Kasus 3 Propinsi di Pulau Jawa", *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3 No. 1 Mei 2009, 77-88.
- Jones, Benjamin F. and Benjamin A. Olken, 2005 "Do Leaders Matter? National Leadership and Growth since World War II," *Quarterly Journal of Economics*.
- Kagochi, J. M, "Leadership Style Influence On Economic Growth in Negeria", *Journal of Economic Theory*, 2008
- Leonard, Jhon. 1991. "Divided Government and Dysfunctional Politics. *Political Science and Politics*", Vol. 24, 652-3.
- Levine, Ross dan Renelt, David (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *The American Economic Review*, Vol. 82, No. 4. 942-963
- Lingkar Survei Indonesia LSI (2007). "Pilkada dan Pemerintahan Terbelah", *Kajian Bulanan LSI*, edisi 07 November.
- Mankiew, "A Contribution To The Empirics Of Economic Growth", *Quarterly Journal of Economics*, 1992
- Masfufah. 2013. "Konvergensi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Wilayah Kabupaten/Kota Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Volume 15 no. 2 Juli 2013: 194 – 202.

Nairobi

*Kepemimpinan Di Daerah Dan Pengaruhnya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
(Studi Sinergitas Kepala Daerah Dan DPRD Di Indonesia)*

- Mayhew, David. 1991. *Divided We Govern*. New Haven. University Press, Yale.
- McCubbins, Mathew D. dan Gary W. Cox. 1991 "On the Decline of Party Voting in Congress." *Legislative Studies Quarterly* 16, 4 (1991): 547-570.
- Parkins, Anna, Beverly Shirley and Alvin Wint, 2008, "The Role of Political Leadership in Economic Development:With Social Reference of Jamaika" *forthcoming*.
- Streb, Jorge M. dan Torrens, Gustavo. 2009. *Making Rules Credible: Divided Government and Political Budget Cycles*, mimeo.
- Sundquist, James L. 1988. Needed: A Political Theory for The New Era of Coalition Government in The United States. *Political Science Quarterly* 103: 614-624.
- Tajerin, 2007. "Peranan Teknologi dalam Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah Pesisir di Kawasan Timur Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol 12 No. 3, 179-194.
- Winarno, W. W., 2007, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, edisi 3
- Wint Alvin G. 2002, "Competitiveness in Small Developing Economic, insight from Caribbean" *University of the West Indies*.
- Wu, Chung-li dan Chi Huang. 2007. "Divided Government in Taiwan's Local Politics: Public Evaluations of City/County Government Performance", *Party Politics* vol 13: 741-760.
- Thomas, Rusuhuzwa Kigabo, 2008. "Leadership, Policy Making, Quality of Economic Policies. and Their Inclusiveness: The Case Of Rwanda". *Working Paper no. 20 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank On behalf of the Commision on Growth and Development, Washington DC*.

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

archive.org

Internet Source

4%

2

mamanfathurochman.wordpress.com

Internet Source

3%

3

www.lsi.co.id

Internet Source

2%

4

ep.feb.unila.ac.id

Internet Source

2%

5

docplayer.info

Internet Source

1%

6

www.nasdem-jombang.com

Internet Source

1%

7

lib.ibs.ac.id

Internet Source

1%

8

bbp2tp.litbang.pertanian.go.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%